

RENCANA KERJA (RENJA)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA GUNUNGSITOLI
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat kasih karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli Tahun 2016 - 2021. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini merupakan kerangka anggaran yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2019.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN LASE, M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19661021 199801 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam 1 (satu) tahun, sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2019. Penyusunan RENJA mengacu pada pagu indikatif yaitu jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun ke depan yang ditetapkan berdasarkan standar satuan harga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penyusunan dokumen RENJA Perangkat Kerja Daerah menjadi acuan dari penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Organisasi Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA ini untuk mengoptimalkan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan fungsi pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, pembinaan politik di Kota Gunungsitoli serta mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance. Disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana daerah wajib menyusun RKPD yang didasari pada penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan bangsa Dan Politik Kota Gunungsitoli.
2. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan mewujudkan masyarakat yang damai, tertib dan tercipta kebersamaan.
3. Menggambarkan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang menyangkut tentang Kesatuan Bangsa dan Politik dari berbagai sumber pendanaan.
4. Sebagai bahan dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Bakesbangpol. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada bagian bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun - tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada **lampiran 2.1**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli sampai dengan tahun 2017 dengan mencermati capaian program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dalam

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli 2016-2021 dapat dilihat pada **Lampiran 2.2.**

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang meliputi :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun dari segi kualitas, regenerasi aparatur perencanaan dan pemahaman terkait program kegiatan harus lebih ditingkatkan lagi. Belum adanya aparatur fungsional perencanaan sebagai pelengkap dalam struktur organisasi merupakan salah satu tantangan kedepan yang akan dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli.

b. Anggaran

Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.

2.3.2. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli, meliputi :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi masih rendah sehingga perlu membangun rasa kepercayaan tersebut.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata dan bahkan belum memenuhi standar di beberapa wilayah Kota Gunungsitoli.
3. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai rambu-rambu hukum yang masih dilaksanakan oleh sebagian kelompok masyarakat.
4. Meningkatnya transformasi teknologi dan informasi yang cepat, sehingga perlu adanya penyesuaian baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.
5. Bervariasinya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.

b. Peluang

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi yang seluas-luasnya yang diterapkan sehingga makin leluasa untuk meningkatkan pembangunan daerah.
2. Adanya dukungan dari lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ormas dan LSM baik itu bersifat kritik, masukan bahkan pengawasan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan.
3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik bersifat partisipasi swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
4. Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kota Gunungsitoli sehingga membantu percepatan pembangunan serta dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modal terutama dibidang perkebunan dan pertambangan.
5. Sudah terbinanya hubungan kerjasama yang baik dengan aparat keamanan (TNI/POLRI) dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

2.3.3. Isu-isu Penting

a. Isu Internal

1). Tugas Pokok dan Fungsi

- Inovasi dan mediasi dibidang keamanan ketertiban dan data statistik dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
- Penelitian-penelitian dibidang keamanan tentang keluar masuknya warga pendatang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan monitoring.
- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi.
- Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses yang sesuai dengan data dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi keamanan daerah secara terstruktur.
- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil monitoring/evaluasi terhadap masyarakat.
- Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat terwujud dengan baik dan terencana.

2). Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3) Sarana dan Prasarana

- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas yang sesuai dengan masing-masing fungsi.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan dan kesejahteraan.

4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kota Gunungsitoli. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kota Gunungsitoli menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal

1). Perubahan Sistem Pemerintah Pusat

Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia Periode 2014-2019 maka secara sistematis akan mempengaruhi kebijakan. Mengantisipasinya dengan mengikuti secara kontinyu perkembangan-perkembangan yang terjadi pada pemerintah pusat terkait dengan kebijakan daerah.

2). Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat.

3). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan **good governance** dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan **good governance** dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Pada bagian ini dapat kami Review Rancangan Awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli sebagaimana pada **lampiran 2.3**.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Parpol asosiasi-asosiasi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan Sasarannya semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Visi didefinisikan sebagai pandangan jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif, lebih lanjut dinyatakan bahwa Visi yang diinginkan oleh Institusi Pemerintah, maka dirumuskan Visi Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Gunungsitoli yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA GUNUNGSITOLI YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN, RUKUN ANTAR UMAT BERAGAMA, SUKU DAN RAS, DEMOKTRATIS DAN KONDUSIF”.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Misi Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pelatihan, sosialisasi langsung ditengah msayarakat dan pelaksanaan upacara peringatan hari – hari besar nasional;
2. Memaksimalkan kemitraan kepada FKUB, FKDM, FPK dan KOMINDA dalam mewujudkan dan menjaga situasi yang kondusif di Kota Gunungsitoli;
3. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat Kota Gunungsitoli;
4. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
5. Melakukan pengawasan terhadap orang asing dan organisasi asing dan pembinaan kepada organisasi kemasyarakatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli Tahun 2016 - 2021, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan.
2. Menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat dalam pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara dan ketahanan ideologi bangsa.
3. Menciptakan iklim komunikasi yang harmonis antar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan antar etnis.
4. Memantapkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan melaksanakan penyuluhan kesadaran.
5. Terselenggaranya komunikasi keagamaan dan sosialisai sosial budaya
6. Terlaksananya evaluasi, monitoring dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan pemilu.

B. Sasaran

Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan.
2. Peningkatan keterlibatan aktif dalam masyarakat.
3. Terciptanya rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilingkungan masyarakat.
4. Terciptanya kemampuan masyarakat akan budaya politik, kesadaran berbangsa dan bernegara.
5. Melaksanakan penyuluhan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi tokoh masyarakat
7. Meningkatnya kerukunan beragama didalam masyarakat dan peningkatan pengetahuan masyarakat akan sosial budaya.
8. Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan Pemilu.

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Lamandau dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Gunungsitoli, pada dasarnya kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli adalah sebagai “pengarah” setiap program perlindungan masyarakat dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan keamanan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sesuai dengan visi Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 yaitu **Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing**".

Sesuai dengan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Kota Gunungsitoli Yang Berwawasan Kebangsaan, Rukun Antar Umat Beragama, Suku dan Ras, Demokratis dan Kondusif"**.

Program dan kegiatan yang dirancang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli tahun 2019 yang terdiri dari 8 program dan 34 kegiatan antara

Program Utama :

1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

Program Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Tabel 3.3.1.

Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kota Gunungsitoli Tahun 2019

No	Prioritas Program	Kegiatan
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	a. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Gunungsitoli b. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kota Gunungsitoli
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	a. Peringatan Hari Ulang Tahun RI Kota Gunungsitoli b. Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional c. Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila d. Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional e. Melaksanakan Upacara Hari Lahirnya Pancasila
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	a. Pemantapan Stabilitas Sosial Politik b. Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah c. Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Parpol
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	a. Penanganan konflik sosial Kota Gunungsitoli b. Pengembangan Satgas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Gunungsitoli
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	a. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) b. Pengawasan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing

BAB IV PENUTUP

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 ini, yang mana Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016 - 2021 sebagaimana Visi Pembangunan Kota Gunungsitoli yaitu **"Kota Gunungsitoli Yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing"** Sedangkan upaya untuk mendukung Visi Kota Gunungsitoli tersebut diatas, dijabarkan dalam misi yang ke-5 (lima) yaitu Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Berbudaya, Religius, dan taat Hukum. Misi ini mempunyai keterkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli yaitu pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, pembinaan politik dan kewaspadaan dini daerah untuk menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan serta memperkuat kerukunan umat beragama masyarakat Kota Gunungsitoli.

Dalam rangka upaya mendukung Visi dan Misi tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli mempunyai Visi yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Kota Gunungsitoli Yang Berwawasan Kebangsaan, Rukun Antar Umat Beragama, Suku dan Ras, Demokratis dan Kondusif"**.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019. Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunungsitoli dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Gunungsitoli.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN LASE, M.Pd
PEMBINA TK.I

NIP. 19661021 199801 1 002

RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

URUSAN :

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum (Kesatuan bangsa dan Politik)

PERANGKAT DAERAH :

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO	PROGRAM / KEGIATAN		PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	KET.
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Pengembangan kualitas pelayanan publik yang didukung dengan sdm aparatur daerah yang memiliki etos kerja dan kapabilitas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%						
	1	Penyediaan Jasa Surat menyurat					Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Adanya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1.300.000	
	2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik					Tersedianya biaya Jasa Komunikasi, Sumb Daya Air dan listrik	1 Tahun	Adanya biaya Jasa Komunikasi, Sumb Daya Air dan listrik	1 Tahun	15.000.000	
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional					Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas /operasional	1 Tahun	Adanya jaminan perizinan kendaraan dinas /operasional	1 Tahun	3.100.000	
	4	Penyediaan Alat Tulis kantor					Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Adanya alat tulis kantor	1 Tahun	20.000.000	
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Adanya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	17.000.000	
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor					Tersedianya komponen instalasi/ penerangan	1 Tahun	Adanya komponen instalasi/ penerangan	1 Tahun	2.500.000	
	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 Tahun	Adanya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 Tahun	3.600.000	
	8	Penyediaan Makanan dan minuman					Tersedianya biaya makan dan inuman rapat staf,kegiatan dan tamu	1 Tahun	Adanya biaya makan dan Minuman rapat staf,kegiatan dan tamu	1 Tahun	30.000.000	
	9	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah					Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan di luar daerah	1 Tahun	Adanya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan di luar daerah	1 Tahun	150.000.000	
	10	Monitoring/survei/Pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah					Terlaksananya monitoring/survei/pengawasan/evaluasi serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	Adanya monioring / survey / pengawasan / evaluasi serta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	35.000.000	
	11	Penyediaan peralatan kebersihan kantor					Tersedianya peralatan kebersihan kantor	1 Tahun	Adanya peralatan kebersihan kantor	1 Tahun	1.600.000	
	12	Penyediaan Jasa Administrasi Umum					Tersedianya honorarium pejabat dan staf pengelola keuangan dengan baik	1 Tahun	Adanya honorarium pejabat dan staf pengelola keuangan dengan baik	1 Tahun	57.296.000	

	13	Penyediaan jasa supir/ kernet/ operator alat berat				Tersedianya honorarium supir mobil dinas	1 Tahun	Adanya honorarium supir mobil dinas	1 Tahun	22.856.000	
	14	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor				Tersedianya honorarium pegawai honorer / tidak tetap kebersihan kantor	1 Tahun	Adanya honorarium pegawai honorer / tidak tetap kebersihan kantor	1 Tahun	19.256.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur	100%				
	1	Pengadaan Meubelair				Tercapainya Pengadaan dan Perlengkapan Meubelair Kantor	1 Tahun	Adanya Pengadaan dan Perlengkapan Meubelair Kantor	1 Tahun	30.000.000	
	2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tercapainya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 tahun	Adanya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	50.000.000	
	3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 tahun	Adanya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	7.500.000	
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Terpenuhinya Pemeliharaan Suku Cadang dan BBM	1 tahun	Adanya Pemeliharaan Suku Cadang dan BBM	1 Tahun	40.870.000	
	5	Sewa Gedung				Tersedianya Sewa Gedung Kantor	1 tahun	Adanya Sewa Gedung Kantor	1 Tahun	60.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Persentase Sumber daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnyanya	100%				
	1	Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Sosialisasi / Kursus				Meningkatnya pengetahuan aparatur sesuai dengan tupoksinya	1 tahun	Adanya pengetahuan aparatur sesuai dengan tupoksinya	1 Tahun	50.000.000	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan					Persentase Pemberdayaan Forum - forum Kelembagaan tentang Wawasan Kebangsaan	100%				
	1	Peningkatan kapasitas dan kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Gunungsitoli				Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya peningkatan kapasitas dan kelembagaan FKDM Kota Gunungsitoli	1 Tahun	50.000.000	
	2	Peningkatan kapasitas dan kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Gunungsitoli				Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya peningkatan kapasitas dan kelembagaan FPK Kota Gunungsitoli	1 Tahun	50.000.000	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan	100%				
	1	Peringatan Hari Ulang Tahun RI				terselenggaranya perayaan HUT RI ke 74 di Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya Perayaan HUT RI ke 74 di Kota Gunungsitoli	1 Tahun	150.000.000	
	2	Melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional				Terselenggaranya Upacara bendera tanggal 17 setiap bulan berkenan di Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya Pelaksanaan Upacara Bendera tanggal 17 setiap bulan berkenan	1 Tahun	20.000.000	
	3	Melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila				Terselenggaranya peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Gunungsitoli	1 Tahun	15.000.000	

4	Melaksanakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional					Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya pelaksanaan Hari Kebangkitan Nasional di Kota Gunungsitoli	1 Tahun	10.000.000	
5	Melaksanakan Upacara Hari Lahirnya Pancasila					Terselenggaranya Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya pelaksanaan Hari Lahirnya Pancasila di Kota Gunungsitoli	1 Tahun	20.000.000	
6	Peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa bagi masyarakat					Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Bela Negara	1 Tahun	Adanya Pelaksanaan Pelatihan dan Penyuluhan Tentang Bela Negara Kepada Pemuda dan Pelajar	1 Tahun	40.000.000	
7	Sosialisasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan					Terlaksananya Sosialisasi Pematapan 4 (empat) Pilar wawasan Kebangsaan di kota Gunungsitoli	1 Tahun	adanya Pemahaman Masyarakat Tentang 4 (empat) Pilar wawasan Kebangsaan di Wilayah Kota Gunungsitoli	1 Tahun	40.000.000	
Program Pendidikan Politik Masyarakat						Cakupan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik	100%				
1	Pembinaan Partai Politik					Terlaksananya pembinaan dan Sosialisasi kepada partai politik yang terdaftar di Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya pembinaan dan Sosialisasi kepada partai politik yang terdaftar di Kota Gunungsitoli	1 Tahun	50.000.000	
2	Pemantapan Stabilitas Sosial Politik					Terselenggaranya sosialisasi dan pembinaan politik bagi Pelajar/Mahasiswa dan Masyarakat	1 tahun	Adanya sosialisasi dan pembinaan politik bagi Pelajar/Mahasiswa dan bagi masyarakat	1 Tahun	50.000.000	
3	Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan					Terlaksananya Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	1 tahun	Adanya Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	1 Tahun	50.000.000	
4	Verifikasi keabsahan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik					Tersusunnya laporan verifikasi administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya laporan verifikasi administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Gunungsitoli	1 Tahun	25.000.000	
5	Pemantauan dan evaluasi perkembangan politik di daerah					Tersusunnya laporan hasil evaluasi Pemantauan dan evaluasi perkembangan politik Daerah di Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya laporan hasil evaluasi Pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah di Kota Gunungsitoli	1 Tahun	25.000.000	
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan						Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	100%				
1	Penanganan Konflik Sosial di Kota Gunungsitoli					Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya Rapat - Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kota Gunungsitoli	1 Tahun	15.000.000	
2	Pengembangan Satgas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Gunungsitoli					Terlaksananya Kegiatan Satgas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Gunungsitoli	1 tahun	Adanya Kegiatan Satgas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Gunungsitoli	100%	100.000.000	

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						100%	Meningkatnya Antisipasi dan Pencegahan terhadap HI-HAI yang Berdampak Buruk bagi Ketertahanan dan Keterlibatan Masyarakat						
1	Fixedisasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)		Berfungsinya Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kota Gununggabal	1 tahun	Adanya Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di Kota Gununggabal	1 Tahun						30.000.000	
2	Pegawasan aktivitas orang asing dan lembaga asing		Terpaparnya dan teridentifikasi berbagai aktivitas dan permasalahan orang asing dan lembaga asing	1 tahun	Adanya identifikasi berbagai aktivitas dan permasalahan orang asing dan lembaga asing	1 Tahun						20.000.000	
JUMLAH SELURUHNYA												1.376.878.000	

